

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Juni tahun 2019 dunia dikejutkan dengan wabah Covid-19 yang kasusnya ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Dan pada bulan Maret 2020 ditemukan kasusnya pertama kali di Indonesia. Akibatnya masyarakat dihimbau untuk karantina mandiri di rumah masing-masing dalam beberapa kurun waktu, melakukan semua pekerjaan dan aktivitas lainnya dari rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keadaan ini membuat Indonesia dan beberapa negara lainnya terancam ke arah resesi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Hal ini juga menyebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Beberapa sektor yang mengalami penurunan secara drastis merupakan sektor yang erat dengan interaksi masyarakat secara langsung, seperti perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Kelompok usaha UMKM juga merupakan salah satu yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2021

PDRB Menurut Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	1	-1
Pertambangan dan Penggalan	7	0	-12
Industri Pengolahan	6	-1	3
Pengadaan Listrik dan Gas	3	-1	2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	5	7

Konstruksi	8	-3	4
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6	-8	7
Transportasi dan Pergudangan	9	-6	10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9	-8	4
Informasi dan Komunikasi	8	9	7
Jasa Keuangan dan Asuransi	5	0	1
Real Estate	7	3	3
Jasa Perusahaan	7	-7	3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	-1	0
Jasa Pendidikan	8	2	1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7	10	5
Jasa Lainnya	4	-16	3
PDRB	6	-0	-6
PDRB (Tanpa Migas)	5	-1	4

Sumber : Jurnal Hani Ningtiasih, Made Suparta (hanining123@gmail.com)

Walaupun skalanya masih tergolong kecil, namun jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini sangat banyak, jadi secara keseluruhan memang sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menopang kembali aktivitas usaha UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi No 267/SM/VIII/2020 pemerintah memberikan bantuan dana usaha kepada 12 Juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Menurut Octafian (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) penyalurannya sudah efektif. Namun belum bisa memberikan peningkatan pendapatan meskipun sebagian besar dana tersebut telah digunakan untuk menambah modal. Dikarenakan selain untuk menambah modal usaha dana tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutup kerugian selama pandemi

Tujuan program ini akan tercapai jika penyaluran program ini tepat sasaran dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh UMKM penerima bantuan dana ini. Namun, walaupun telah ditentukan kriteria penerima bantuan masih ditemukan beberapa yang menyalahgunakan. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak memiliki usaha namun mendaftar program bantuan dana ini guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, situasi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 akan memberikan berbagai dampak, antara lain:

- a. Penurunan permintaan dan turunnya penjualan.
- b. Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap).
- c. Distribusi terhambat.
- d. Kesulitan bahan baku.
- e. Kesulitan mendapatkan permodalan usaha.

Dalam situasi pada tahun 2019 sampai dengan 2021, menurut Kementerian Koperasi dan UKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius diakibatkan adanya pandemi yaitu sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan masalah distribusi barang dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Pandemi pada tahun 2019-2021 tak hanya berdampak negatif ke pengusaha besar, bahkan pengusaha kecil pun terkena imbas. Akibat penurunan daya beli masyarakat, pendapatan mereka merosot tajam. Kedai, toko, dan warung mereka sepi karena orang lebih suka tinggal di rumah setelah adanya larangan sosial secara besar-besaran (PSBB) tersebut. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) akibat pandemi di tahun 2019-2021, sebanyak 82,85% pendapatan pelaku usaha mengalami penurunan.

Tabel 1.2
Dampak Pandemi di Tahun 2019-2021 Terhadap UMKM

No	Jenis UMKM	jumlah
1	Pedagang Besar dan Pedagang Kecil	40,92%
2	Penyedia Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman	26,86%
3	Industri Pengelolaan	14,25%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data riset Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM yang mengalami dampak pandemi di tahun 2019-2021 antara lain pedagang besar dan pedagang enceran menduduki peringkat paling tinggi yaitu sebesar 40,92%, disusul UMKM penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman sebanyak 26,86% dan UMKM yang paling kecil terdampak pandemi adalah industri pengelolaan sebanyak 14,25%. Sebagai sektor yang menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, pertumbuhan UMKM saat ini memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kebangkitan UMKM akan menjadi pendorong utama untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia.

Salah satu skema yang diupayakan oleh pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM dimasa krisis ekonomi pada tahun 2019-2021 yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN. Program PEN tidak hanya di bidang UMKM saja, tetapi juga berupaya untuk menangani seluruh sektor perekonomian di Indonesia yang krisis ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 bahwa pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkuat, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama

tahun 2019-2021. Harapannya supaya dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Tantangan Program PEN untuk UMKM bukanlah masalah besar atau kecilnya dana yang digulirkan, bukan pula masalah cukup atau tidaknya stimulan yang diberikan. Pokok permasalahannya adalah apakah program tersebut sudah tepat sasaran dalam implementasinya. Walaupun klise, hal ini penting karena menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam implementasi program PEN yaitu:

1. Berlandaskan prinsip keadilan sosial.
2. Seluruhnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, karena program ini dialokasikan seluruhnya kepada seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dalam rangka membangkitkan kinerja dan kegiatan masyarakat, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Membangun, meningkatkan dan mempertahankan kinerja pelaku usaha. Pada tahun 2019-2021 berdampak pada aktivitas masyarakat yang berkurang sehingga pemerintah berharap penyelenggaraan program PEN ini dapat mempertahankan kegiatan ekonomi dimasa pandemi covid-19 pada tahun 2019-2021 di Indonesia.
4. Menerapkan pedoman kebijakan dengan secara hati-hati, sistem manajemen yang baik, adil, transparan dan akuntabel.
5. Tidak menimbulkan risiko moral (ekonomi) atau *moral hazard*.
6. Pemangku kepentingan mengalokasikan biaya dan risiko sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Terdapat beberapa skema dukungan yang khusus ditujukan untuk UMKM. Beberapa program yang terkait langsung dengan UMKM adalah Subsidi Bunga UMKM, PPh Final UMKM, Penjaminan Modal Kerja, Penempatan Dana pada Bank yang melakukan restrukturisasi, dan Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM. Dukungan lainnya juga diberikan dalam bentuk program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dicairkan kepada 12 juta pengusaha mikro untuk tambahan modal kerja yang ditransfer ke rekening. Bentuknya adalah hibah, bukan kredit atau pinjaman. Realisasi program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) hingga akhir tahun 2021 mencapai 100 persen. Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) oleh pemerintah ini diberikan kepada usaha mikro yang sedang tidak menerima bantuan apapun.

Usaha mikro merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia yang proporsinya mencapai 99,62% dari total 64.166.606 usaha yang ada di Indonesia. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2019- 2021 mengakibatkan sebanyak 82,85% pendapatan pelaku usaha mengalami penurunan. Maka hal tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang BPUM dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019-2021, sehingga diharapkan dengan adanya program BPUM ini dapat meningkatkan kembali pendapatan pelaku usaha yang sempat turun dikarenakan pandemi covid-19 di tahun 2019-2021.

Tabel 1.3

27 Desa Dengan Jumlah Paling Banyak Penerima Bantuan Bpum di Aceh Tenggara Per Tanggal 14 Agustus 2019- 19 Oktober 2021

No	Nama Desa	Jumlah Penerima
1	Kuta Rih	83
2	Kutacane Lama	196
3	Perapat Hilir	160

4	Perapat Hulu	197
5	Pulo Latong	130
6	Kota Kutacane	92
7	Muara Lawe Bulan	128
8	Mbarung	195
9	Pulonas	192
10	Batumbulan I	2
11	Batumbulan Ii	4
12	Batumbulan Asli	20
13	Kampung Raja	87
14	Kampung Melayu Gabungan	41
15	Terutung Pedi	181
16	Gumpang Jaya	67
17	Batumbulan Baru	6
18	Ujung Barat	44
19	Pulo Peding	75
20	Mendabe	83
21	Perapat Sepakat	154
22	Perapat Titi Panjang	97
23	Pulo Sanggar	62
24	Mbarung Datuk Saudane	33
25	Batumbulan Sepakat	2
26	Kampung Melayu I	22
27	Alas Merancar	76
28	Jumlah	2.198

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tenggara 2019-2021, data diolah

Data di atas menunjukkan 27 desa dengan jumlah paling banyak penerima bantuan BPUM di Aceh Tenggara per tanggal 14 Agustus 2019- 19 Oktober 2021 sehingga penulis memilih Desa Perapat Hulu Kota sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Bantuan Bagi BPUM (bantuan produktif usaha mikro) terhadap pendapatan umkm di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 ?
2. Bagaimanakah efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 ?
3. Bagaimana data perkembangan pendapatan UMKM dari tahun 2019-2021 di Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020
2. Untuk mengetahui efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap pendapatan UMKM di kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020
3. Untuk mengetahui data perkembangan pendapatan UMKM dari tahun 2019 2021 di Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang dipelajari khususnya mengenai pengaruh Efektivitas

Bantuan Program Bpum (Bantuan Produktif Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Umkm di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020. Hasil pengaruh efektivitas bantuan program bpum (bantuan produktif usaha mikro) terhadap pendapatan umkm di kabupaten aceh tenggara tahun 2020. ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan penelitian yang sejenis ditahun yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka mengelola bantuan BPUM lebih baik lagi dalam memberikan bantuan ketepat sarannya dengan tujuan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.